

## ABSTRAK

Hubungan diplomatik dibangun atas dasar kesepakatan bersama dari kedua negara dan memerlukan pertimbangan prinsip hukum timbal balik bagi kedua negara. Setiap perwakilan diplomatik akan mendapatkan hak khusus serta hak istimewa agar dapat mempermudah tugas misinya sebagai perwakilan negara dan dalam praktiknya tidak jarang ditemukan tindak pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak keistimewaan tersebut. Penelitian dan penulisan hukum dibuat dengan tujuan untuk dapat menganalisis dan mengetahui prinsip kekebalan terhadap perlindungan bagi Agen Diplomatik dan Pekerja Rumah Tangga. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konvensi, dan pendekatan kasus. Agen Diplomatik Arab Saudi telah melanggar hukum yang berlaku di Inggris sebagai Negara Penerima seperti peraturan pembayaran upah minimum dan peraturan penerapan jam kerja. Hal tersebut jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya untuk menghormati hukum nasional dari negara setempat. Inggris sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh memiliki kapasitas dalam menindak pelanggaran hukum yang merugikan negaranya, sehingga dapat menggunakan prinsip *jure imperii* terhadap Agen Diplomatik tersebut dengan mengenakan sanksi *persona non grata*.

**Kata Kunci:** Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik, Pejabat Diplomatik

## **ABSTRACT**

*Considering the principle of reciprocity for both countries. Every diplomatic representative will receive special rights and privileges to facilitate their mission as representatives of their country. In practice, violations of these immunity and privilege rights are not uncommon. Legal research and writing are aimed at analyzing and understanding the principle of immunity for the protection of Diplomatic Officials and Domestic Workers. This legal writing employs a normative juridical research method with a legislative approach, a convention approach, and a case approach. A Saudi Arabian Diplomatic Official has violated the applicable laws in the United Kingdom as the Receiving State, such as the minimum wage regulations and working hour regulations. This is clearly an action that contradicts their obligation to respect the national laws of the host country. The United Kingdom, as a fully sovereign country, has the capacity to take action against lawbreakers that harm the country, thus it can apply the principle of jure imperi against the Diplomatic Official by imposing the sanction of persona non grata.*

**Keywords: Diplomatic Immunity and Privileges, Diplomatic Officials**